PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA

Anugerah Ilahi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail : anugerahhilahi08@gmail.com

PENDAHULUAN

Selepas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui dunia. Jalur diplomasi menjadi jalan yang dipilih untuk menggalang pengakuan dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II.

Dua hari setelah kemerdekaan, kabinet pertama Republik Indonesia dibentuk. Kabinet pertama ini meliputi 19 menteri, salah satunya Kementerian Luar Negeri dimana Ahmad Soebardjo tercatat sebagai Menteri Luar Negeri pertama (2 September 1945 - 14 November 1945).

Kabinet ini tak bertahan lama, sejak 14 November 1945 terjadi sejumlah perubahan yang memunculkan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri dalam Kabinet II RI. Perubahan ini termasuk Perubahan sistem Pemerintahan dari Presidensial ke bentuk ministerial. Sejak itu Pemerintah RI menempuh kebijakan politik diplomasi untuk berunding dengan Belanda.

Perundingan pertama terjadi pada 17 November 1945 di markas besar tentara sekutu di Jakarta. Perundingan ini berlanjut dengan pengiriman misi diplomatik pertama Indonesia ke Belanda yang dimulai pada 14 April 1946 di sebuah tempat bernama Hoge Veluwe. Misi tersebut menjadi salah satu awal rangkaian perundingan panjang antara Indonesia – Belanda.

Menurut laman Kementerian Luar Negeri tercatat tiga perundingan penting dalam periode awal tugas diplomasi mempertahankan kemerdekaan, yakni perundingan Linggarjati pada 1946 - 1947 (pengakuan kedaulatan RI meliputi Jawa, Madura dan Sumatera); Perundingan Renville pada 1947 - 1948 (kesepakatan gencatan senjata dan penambahan wilayah Belanda); dan konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 (pengakuan kedaulatan Indonesia).

Perjuangan diplomasi Indonesia akhirnya meraih dukungan masyarakat internasional di Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemulihan Indonesia sebagai Negara kesatuan ini disusul dengan masuknya Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada September 1950.

PEMBAHASAN

- Tahap – Tahap Pembentukan nama NKRI yaitu meliputi Perjanjian, Agresi Militer, persetujuan dan konferensi yang terjadi saat berakhirnya RIS dan terbentuklah NKRI adalah sebagai berikut:

A. Perjanjian Linggarjati (11-15/11/1946)

Perjanjian Linggarjati merupakan Perjanjian yang muncul setelah Belanda melakukan serangan pasca diumumkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia berusaha untuk merebut dan menegakkan wilayah kekuasaan di Indonesia.

Adapun nama Tokoh -Tokoh dalam Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut:

1. Wakil Belanda : Van Mook
2. Wakil Indonesia : Syahrir

Adapun Hasil dari Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut:

3. Belanda mengakui kekuasaan defacto Indonesia (Jawa,Madura, dan Sumatera) Daerah yang di kuasai belanda dan sekutu akan di kembalikan
4. Berangsur-angsur Dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS)
5. Pem. Belanda dan RI akan bentuk Uni Indoneia - Belanda Selesai Sebelum 1/1/1949
6. Pem. RI mengakui,akan memulihkan dan lindungi hak milik asing
7. Pem. Rid an belanda sepakat untuk kurangi jumlah tentara kalau ada perselisihan,akan di selesaikan oleh komite arbitrase.

B. Agresi Militer 1

1. Pada tanggal 21/7/1947 -> Belanda menyerang Indonesia.Menguasai seluruh pelabuhan di jawa. Penangkapan orang china di Jawa Barat Bangsawan di sumatera dibunuh.
2. Pada tanggal 29/8/1947 -> Belanda deklarasikan garis demarkasi Van Mook yang membuat wilayah Indoneia lebih sedikit.
3. Pada ranggal 18/9/1947 -> Komisi 3 negara di bentuk untuk menyelesaikan masalah.

C. Perjanjian Renville (8/12/1947)

Perjanjian Renville adalah sebuah upaya agar menemukan rumusan baru tentang penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda. Namun, pada akhirnya perjanjian Renville ini dilanggar oleh pihak Belanda, komisi Jasa baik yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB tidak diindahkan oleh Belanda.

Perjanjian Renville merupakan sebagai uji coba Belanda agar mengukur kekuatan pihak republik, terbukti Belanda melancarkan kembali Agresi yang kedua dengan target menangkap seluruh pimpinan politik Indonesia serta membunuh hanguskan republik. Beberapa pimpinan Indonesia seperti Sukarno, Hatta, Syahrir dan Agus Salim ditangkap lalu dibuang di Prapat dan Berastagi Sumatera. Namun sebelum itu, Sukarno-Hatta telah menyerahkan mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI agar menjadi Presiden dalam keadaan darurat dan memimpin republik di Sumatera Barat.

Adapun hasil dari Perjanjian Renville adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menyelesaikan masalah di Agresi Militer 1.
2. Delegasi Indonesia dipimpin Amir Syarifuddin
3. Belanda dipimpin : R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo Perjanjian diadakan diatas kapal Renville.
4. Garis demarkasi Van Mook diterima
5. Sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai
6. Kedaulatan Indonesia berada ditangan belanda selama masa peralihan

D. Agresi Militer II

1. Sudah ada tanda-tanda Belanda akan langgar Renville.
2. Pada tanggal 19/12/1947 -> Agresi Militer II.
3. Ibu kota Jogjakarta berhasil dikuasai .
4. Pimpinan Negara ditawan Belanda.
5. Syarifuddin Prawiranegara membentuk PDRI dengan ibukota Bukittinggi.
6. Panglima Sudirman melakukan perang gerilya.
7. Pada tanggal 24/12/1947 DK PBB membuat resolusi agar Indonesia dan Belanda berhenti perang dan memerintahkan Belanda untuk membebaskan tahanan politik.

Kabar pertama pembatalan persetujuan Renville di Yogya berupa serbuan Belanda pada 19 Desember 1948 (Agresi Militer Belanda II). Penyerangan dilakukan dengan pemboman Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya, seperti RRI. Dalam memasuki Yogya Belanda dibantu oleh KNIL (*Koninklijk Nederlands Indische Leger*), pasukan Belanda terdiri dari orang-orang pribumi. Tentara Belanda kemudian menawan Presiden dan Wakil Presiden, Syahrir (penasihat Presiden) sejumlah menteri termasuk Menlu Agus Salim. Tetapi sebelum mereka ditawan, Presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan Negara kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara.³ Yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatra, untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI).

E. Persetujuan Roem Royyen (14/4/1949)

Adapun Tokoh -Tokoh dalam persetujuan Roem Royyen adalah sebagai berikut:

1. Indonesia : Muh.Roem.
2. Wakil Belanda : Van Royen
3. Wakil AS : Merle Cochran

Adapun hasil dari persetujuan adalah sebagai berikut:

1. Indonesia akan hentikan perang gerilya,ikut dalam KMB di den hag.
2. Belanda mengembalikan RI ke Jogja, bebaskan seluruh tahanan politik, dan menghentikan gerakan militer dan menyetujui RI sebagai bagian dari NIS.

Setelah ditandatanganinya Persetujuan Roem-Roijen, maka tentunya muncul beragam reaksi. Reaksi yang cukup keras datang dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda untuk wilayah Indonesia, Dr. L.J.M.Beel, sekalipun dia turut menyetujui persetujuan tersebut, namun sebenarnya Beel menentang Pemerintah Belanda untuk tunduk pada ruling Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949 sehingga terjadilah perundingan dengan pihak Republik Indonesia (Sugiarto Lesmana, jurnal artefak,2013)

F. Konferensi Meja Bundar (KMB) Den Haag, (23/8/1949)

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag. KMB dimulai dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda guna mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia

Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut:

1. Belanda mengakui RIS sebagai Negara merdeka dan berdaulat.
2. Masalah Irian Barat akan di selesaikan setahun kemudian Corak.
3. Pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi oleh para delegasi di KMB.
4. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda yang sifatnya longgar RIS harus bayar hutang Hindia Belanda.
5. RIS akan kembalikan hak milik belanda dan kasih izin untuk perusahaan Belanda.
6. Pada tanggal 16/12/1949 Soekarno terpilih jadi Presiden RIS. Presiden RI sementara diisi oleh Mr. Assaat (ketua KNIP)

Dan Kemudian Pada tanggal 17/8/1950 RIS berakhir, dan terbentuklah **NKRI**.

DAFTAR PUSTAKA

Susilo, Agus, and Ratna Wulansari. "Perjanjian Linggarjati (Diplomasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia Tahun 1946-1947)." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10.1 (2021): 30-42.

Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta : Serambi Mekah

³G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991, hlm. 42.

⁴Opcit. C.s.t. Kansil, dkk, hlm. 53.

Sugiarto Lesmana (2013) *Jurnal Artefak*. Perundingan Roem-Roijen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949

Bundar)", (*Skripsi UNP, Padang, 2007*), hlm. 27

⁶*Ibid.*, 33-34.

⁷*Ibid.*, 36.

⁸Warniati Jusar, "Perundingan tentang Utang Republik pada KMB (Konferensi Meja Bundar)", (*Skripsi UNP, Padang, 2007*),